

**POLITIK DAN DAKWAH
STUDI TENTANG AKTIVITAS GOLKAR
DALAM DAKWAH ISLAMIAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA AGAMA
DALAM ILMU DAKWAH**

Oleh :

MAFTUKIN

NIM : 02874459

1996

P O L I T I K D A N D A K W A H

Studi Tentang Aktivitas Golkar

Dalam Dakwah Islamiah

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama

Dalam Ilmu Dakwah

Oleh :

Maftukin

NIM : 02874459

1996

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul
P O L I T I K D A N D A K W A H
STUDI TENTANG AKTIVITAS GOLKAR
DALAM DAKWAH ISLAMIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

MAFTUKIN

NIM : 02874459

telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah

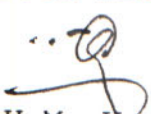
pada tanggal 31 Agustus 1996

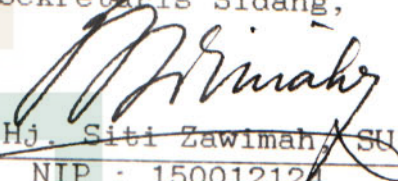
dan telah memenuhi syarat untuk diterima

Sidang Dewan Munaqosyah :


Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,


Drs. H.M. Hasan Baidaie
NIP : 150046342


Dra. Hj. Siti Zawimah, SU.
NIP : 150012124

Penguji I / Pembimbing :


Drs. H. Nasruddin Hararap, SU.
NIP : 150169831

Penguji II,

Penguji III,



Drs. Fathuddin Abdul Ganie
NIP : 150058707


Dr. Faisal Ismail, MA.
NIP : 150102060

Yogyakarta,
IAIN Sunan Kalijaga
Fakultas Dakwah
Dekan,

1996




H. M. Hasan Baidaie
NIP : 150046324

Nota Dinas

Lamp : 7 (tujuh) Ekep.

Hal : Skripsi sdr. Maftukin

Kepada Yang Terhormat.
Bapak Dekan Fak. Dakwah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Y O G Y A K A R T A

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami selaku pembimbing penulisan skripsi saudara :

Nama : Maftukin

NIM : 02874459

Fak/Jur : Dakwah/PPAI

Judul : POLITIK DAN DAKWAH (Studi Tentang
Aktivitas Golkar Dalam Dakwah Islamiah)

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta mem-
beri bimbingan sepenuhnya, maka telah memenuhi
syarat untuk diajukan kepada fakultas Dakwah IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk dimunagiosyahkan.

Demikianlah pemberitahuan ini atas perhatian Bapak
kami haturkan terima kasih.

Waassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Agustus 1998

Pembimbing I

Pembimbing II



(Drs. Nasruddin Harahap, SU)

(Drs. Mahfudz Fauzi)

NIP. 150 169 831

NIP. 150 189 932

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	6
C. Rumusan Masalah	19
D. Tujuan Penelitian	19
E. Kegunaan Penelitian	20
F. Kerangka Pemikiran Teoritik	21
1. Teori Dakwah	21
2. Politik	24
3. Motivasi	32
a. Pengertian Motivasi	33
b. Macam-macam Motivasi	34
G. Metodologi Penelitian	37
1. Jenis Penelitian	37
2. Metode Pengumpulan Data	37
3. Metode Analisa Data	37
BAB II KETERKAITAN DAKWAH DENGAN POLITIK	40
A. Dakwah Islamiah	43

B. Politik	50
C. Hubungan Antara Politik Dengan Dakwah	56
1. Politik Sebagai Alat Dakwah	58
2. Profesionalisme Politik	66
BAB III GOLKAR DAN DAKWAH ISLAMIAH	69
A. Militer di Panggung Politik	69
1. Terbentuknya Golongan-Golongan Fungsional	81
2. Meletakkan Pilihan Pada Sekber Golkar ..	95
B. Golkar Dalam Pemilu-Pemilu Orde Baru	110
1. Golkar Dalam Pemilu 1971	110
2. Golkar Dalam Pemilu 1977	113
3. Golkar Dalam Pemilu 1982	118
4. Golkar Dalam Pemilu 1987	123
5. Golkar Dalam Pemilu 1992	126
C. Kontribusi Golkar Terhadap Dakwah Islamiah	133
1. GUPPI	133
2. MDI	154
D. Motivasi Golkar Dalam Kegiatan Dakwah	160
1. Tinjauan Tentang Motivasi	160
2. Motivasi Dakwah	162
a. Motif Institusi	164
b. Motif Individual	165
BAB IV PENUTUP	167
A. Kesimpulan	167
B. Saran-Saran	176

C. Kata Penutup	178
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENEGASAN JUDUL

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa pernyataan yang berkaitan dengan judul.

Judul skripsi ini adalah "POLITIK DAN DAKWAH" (Studi Tentang Aktivitas Golkar Dalam Dakwah Islam). Ada dua pernyataan yang perlu ditegaskan dari judul tersebut diatas, yaitu :

1. Golongan Karya (Golkar)

Golkar, yang nama sebelumnya adalah Badan Kerja Sama (1957) dan kemudian menjadi Sekber-Golkar (1964) pada mulanya merupakan organisasi kepentingan yang dibentuk ABRI. Pada tahap berikutnya, organisasi ini menghimpun berbagai kekuatan fungsional (terutama kaum pekerja profesional, termasuk intelektual) dan mengembangkan diri menjadi organisasi penekan yang dimaksudkan untuk menghadapi berbagai tantangan terhadap kekuatan militer pada waktu itu, khususnya ancaman dari pihak komunis.¹⁾

Ketika Orde Baru lahir, pemerintah dihadapkan pada berbagai persoalan yang meminta untuk dita-

1) Ipong S. Azhar. "Partisipasi Politik Pemuda Dan Golkar". LP3M, 17 Mei 1993

ngani dan diselesaikan secepatnya. Salah satu persoalan ini adalah desakan dari semua pihak agar pemerintah segera melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu).

Disatu pihak karena pemerintah yang baru berdiri ini memang masih sangat butuh legitimasi, desakan atau tuntutan untuk segera melaksanakan Pemilu ini mau tidak mau harus dipenuhi. Namun di lain pihak, pemerintah juga tidak mau kalau Pemilu justru akan menjadi sarana yang mengakibatkan kekuasaan mereka diambil alih oleh pihak lain. Dengan demikian, jalan yang diambil untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Orde Baru kemudian menjadikan Sekber-Golkar sebagai partai politik (OPF) dan memforsir segala kekuatan yang dimiliki untuk mengembangkannya, agar kalau Pemilu diselenggarakan, Sekber-Golkar yang pada tanggal 27 April namanya diubah menjadi Golkar, dapat menjadi pemenang.²⁾

Seperti sudah kita ketahui bersama, Golkar ternyata berhasil tampil menjadi pemenang mutlak dalam Pemilu 1971. Dan sejak saat itu sampai yang terakhir (Pemilu 1992), supremasi Golkar ini tak mungkin tergoyahkan lagi.

2) Kedaulatan Rakyat. 5 Juni 1993, hal. 4

2. Dakwah Islamiah

Kita mengetahui bahwa istilah dakwah Islamiah sebenarnya cukup populer. di Indonesia khususnya. dan di dunia Islam pada umumnya. Agar kita lebih jelas pemahamannya terhadap istilah dakwah ini. maka terlebih dahulu perlu dipahami arti dakwah yang ditinjau dari segi :

2.1. Bahasa

Kata dakwah menurut bahasa berasal dari bahasa arab. yaitu :

دَعَا - يَدْعُو - دَعْوَةٌ

Artinya : Mengajak. menyeru. memanggil dan mengundang.³⁾

Kata dakwah ini dalam Al-Qur'an dapat dipergunakan dalam arti menyeru kepada yang baik maupun yang buruk. seperti tertulis dalam surat Al-Mu'min ayat 41 yang artinya : "Hai Kaumku. bagaimanakah kamu. Aku seru kamu (*ad'uukum*) kepada keselamatan tapi kamu menyeruku (*tad'uunani*) ke neraka". Di tempat lain dakwah bisa juga berarti do'a (*daa'i*) apabila ia berdo'a (*daa'a*) kepada-Ku". Jadi pengertian dakwah dari segi bahasa itu bermakna luas dan netral. karena ia bisa berarti mengajak. memanggil atau mengundang orang untuk hal-hal yang

3) Nasruddin Harahap. Cs. (Ed). "Dakwah Pembangunan". (Yogyakarta : DPD Golongan Karya Tk. I Propinsi DIY. 1992). hal. 1

benar atau yang tidak benar.

2.2. Istilah

Kata dakwah bila kita tinjau dari segi istilah memberi pengertian. dakwah ialah segala usaha dan kegiatan yang disengaja dan berencana dalam wujud sikap, ucapan dan perbuatan. baik langsung ditujukan kepada perorangan atau masyarakat maupun golongan, supaya tergugah hatinya kepada Islam.

Para ahli telah banyak merumuskan definisi dakwah diantaranya :

- a. Syekh Ali Mahfudz yaitu. dakwah sebagai usaha memotivasi orang-orang agar tetap menjalankan kewajiban dan memerintah mereka untuk berbuat ma'ruf serta melarang berbuat mungkar. agar mereka memperoleh kebahagiaan baik di dunia dan akherat.
- b. Prof. Toha Yahya Umar yaitu dakwah sebagai ajakan manusia dengan cara bijaksana dengan jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan. untuk kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan akherat.
- c. Syekh Bahiyyul Khulli yaitu. memindahkan umat dari situasi ke situasi yang lain yang lebih baik.
- d. M. Adnan Harahap yaitu. suatu usaha merubah sikap dan tingkah laku orang dengan jalan menyampaikan informasi tentang ajaran Islam dan

menciptakan kondisi serta situasi yang diharapkan dapat mempengaruhi sasaran dakwah. sehingga terjadi perubahan ke arah sikap dan perilaku positif menurut norma-norma agama Islam.

Masih ada banyak definisi dari kalangan ahli atau ulama'. Namun berbagai definisi yang ada tentang pengertian dakwah tidak seharusnya dipertentangkan. tetapi harus dilihat sebagai sesuatu yang saling melengkapi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh dari dakwah sebagai suatu konsep dengan tingkat abstraksi yang tinggi. Terlihat adanya tiga hal pokok yang selalu ditonjolkan dalam berbagai rumusan definisi dakwah. sehingga ketiga hal tersebut dapat difahami sebagai pokok-pokok pengertian yang ada dalam konsep dakwah Islam itu adalah :⁴⁾

- a. *Amar ma'ruf nahi mungkar*. Seluruh kegiatan dakwah pada dasarnya bertujuan untuk merealisasikan kebaikan (*al-khoir*) dalam kehidupan kemasyarakatan, dan mencegah kemungkaran atau segala hal yang menyebabkan orang semakin jauh dari jalan Tuhan Allah SWT.
- b. *Ishlah*. Makna ishlah dari dakwah ini nampak kuat pada upaya dakwah untuk menurunkan kadar keburukan dan meningkatkan kualitas kebaikan di

4) *Ibid.*.. hal. 3

dalam masyarakat. Dalam makna ini dakwah difahami sebagai upaya yang bertujuan untuk merubah kondisi negatif ke kondisi yang positif atau untuk memperbaharui dalam makna meningkatkan kondisi yang positif ke kondisi yang lebih positif lagi.

c. *Amar ma'ruf nahi mungkar* dan *ishlah* yang dilakukan dalam konteks dakwah itu adalah untuk satu tujuan, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat obyek dakwah.

Jadi yang dimaksud dari judul penelitian diatas adalah, penelitian terhadap lembaga atau organisasi sosial-politik yaitu, Golkar yang kaitannya dengan dakwah Islamiah di Indonesia.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Didalam sistem politik di kebanyakan negara berkembang, kekuatan-kekuatan politik yang ada sering kali berkaitan dengan ciri-ciri keagamaan. Hal ini karena, lingkungan masyarakatnya lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor primordial, seperti budaya, etnis dan agama. Di Indonesia misalnya sejak kemerdekaan sering terjadi konflik-konflik yang bersumber dari perbedaan-perbedaan tersebut. Khususnya di bidang agama, berbagai masalah yang sering kali ditimbulkan oleh kelompok-kelompok radikal dalam Islam menjurus

pada proses dis-integrasi atau konflik.⁵⁾

Hadirnya Golkar dalam sistem politik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari prakondisi yang mengawali-nya sejak tahun-tahun akhir dekade 50-an. Dengan makin besarnya peranan politik Soekarno disatu pihak dan mulai merosotnya pamor partai-partai politik dipihak lain, maka bersamaan dengan upaya mengintensifkan peranan sosial-politik ABRI secara konsepsional telah pula dimulai langkah-langkah membangun suatu partai pemerintah dengan ABRI tulangpunggungnya. Tampaknya para pendiri Golkar sudah mencium "gelagat" akan makin rapuhnya partai-partai.⁶⁾ Memang tinggal hanya PKI yang masih bisa bernafas sampai akhir Orde Lama. Bersamaan dengan itu Golkar telah pula disiapkan sedemikian rupa untuk menjadi partai "alternatif" jika disuatu ketika terjadi transformasi politik.

Karena itu tidak mengherankan jika begitu PKI dan Soekarno sebagai dua kekuatan politik utama Orde Lama jatuh, maka Golkar muncul sebagai satu-satunya partai yang memiliki peluang untuk tampil dipentas politik Indonesia. Apalagi keruntuhan pamor partai-partai politik meninggalkan bercak-bercak atau bahkan

5) Heru Cahyono. "Peranan Ulama' Dalam Golkar 1971-1980". Cetakan I (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1992). hal. 9

6). M. Rusli Karim. "Perjalanan Partai Politik Di Indonesia". Cetakan I (Jakarta : Rajawali Pers. 1983). hal. 149

noda-noda untuk mengutuk partai politik maka kehadiran Golkar yang tidak memakai label partai, dengan sendirinya memiliki peluang emas untuk mengisi kekosongan partai politik. Lebih-lebih dengan dukungan penuh atau mutlak dari pemerintah, tidak ada alasan bagi Golkar untuk tidak tampil sebagai satu-satunya kekuatan politik yang memiliki masa depan yang cerah.

Untuk itulah Golkar ditegakkan dengan dukungan birokrasi dan ABRI. Pertumbuhannya pada fase formatif awal Orde Baru tidak melalui proses evolutif, melainkan melalui rekayasa dalam rangka menata kembali kehidupan politik yang telah porak poranda sebagai akibat dari ulah Soekarno yang haus kekuasaan dan terlalu "menganak emaskan" PKI. Memang, kehadiran Golkar yang lahir secara *de facto* dan *de jure* pada 20 Oktober 1964, ketika suatu partai hegemonik yang kelak digantikannya, PKI, sedang menuju titik kulminasi kejayaannya sangat tepat momentumnya. Sebagaimana kita ketahui cikal bakal (embrio) Golkar paling tidak, bisa ditelusuri sejak beberapa waktu setelah Pemilihan Umum tahun 1955, ketika kekuasaan politik makin terpusat ditangan Bung Karno, yang bisa disebut sebagai Front Nasional. Pengkajian, secara mendalam terhadap perilaku kekuatan politik era demokrasi terpimpin menunjukkan bahwa kekuatan politik riil makin bertumpu pada dua kekuatan, Bung Karno dan Partai Komunis Indonesia (PKI) sambil dibayang-

bayangi oleh militer. dalam hal ini TNI-AD. Memang perlu dibuktikan seberapa besar derajat aliansi antara Bung Karno dan PKI. bahkan sampai sekarang masih terdapat teka-teki terselubung tentang "siapa yang memperalat siapa" antara Bung Karno dan PKI. tetapi hampir tidak dapat dibantah sebelum dibutuhkan lain. bahwa Bung Karno sangat memusuhi kekuatan-kekuatan, politik lainnya kecuali PKI. Berpijak dari sejarah tersebut di atas. bahwa Golkar dilahirkan pemerintah dan ABRI tidak lain hanyalah untuk memben-
dung gerak PKI.

Maka ketika pemerintah Orde Baru memegang kenda-
li atas pemerintah segera dipikirkan strategi pemba-
ngunan politik yang lebih baik. sehingga pengalaman
buruk masa Orde Lama tidak terulang lagi. Orde Baru
berusaha menciptakan iklim pembinaan politik yang
lebih sehat dan berorientasi pada pembangunan. se-
hingga tidak terulang lagi kenyataan bahwa pembangu-
nan justru dikorbankan demi kepentingan politik yang
sama sekali tidak berhimpit dengan kepentingan pem-
angunan. Dalam kaitan itu. pemerintah Orde Baru
memikirkan perbaikan struktur politik yang bisa ber-
fungsi lebih baik yang tidak lagi mendasar diri pada
pertentangan-pertentangan politik dan ideologi yang
sempit. Dengan demikian. setelah berhasil menaklukan
sepenuhnya kekuatan Orde Lama. pemerintah Orde Baru
segera memikirkan kontrol yang lebih ketat terhadap

kekuatan politik Islam. khususnya kemungkinan tantangan dari kelompok radikal dalam Islam yang akan merebut organ-organ kekuasaan negara dan wewenang pemerintah.

Salah satu basis kekuatan politik Islam di Indonesia adalah massa pesantren, yang dipimpin oleh kaum ulama tradisional di pedesaan Pulau Jawa. Semula mereka bergerak dibidang pendidikan Islam (tradisional). Namun kemudian mereka juga berusaha mengembangkan peranannya dalam politik. Hal ini terlihat sejak dasawarsa 1950-an dan kenyataannya mereka mampu membina basis massa yang semakin berkembang dan berakar kuat. khususnya setelah Nahdlatul Ulama yang merupakan wadah aspirasi politik ulama tradisional Islam menyatakan diri keluar dari Masyumi untuk selanjutnya membentuk partai politik sendiri. Sejak menjadi partai politik, keterlibatan NU di dalam politik semakin jauh dan NU berkembang menjadi partai yang kuat. Kekuatan NU terutama terletak pada daya kharismatik ulama-ulamannya yang sangat di patuhi oleh para pengikutnya.

Sementara itu seiring dengan masuknya cita-cita modern Islam pada awal abad ke-20. dalam pendidikan Islam pun diadakan pembaruan. Beberapa kalangan Islam mulai menganggap penting soal administrasi, organisasi, serta metode pengajaran yang lebih terorganisasi

disertai kurikulum yang mulai jelas.⁷⁾ Akan tetapi setelah kemerdekaanpun masih dirasakan berbagai kelemahan dalam pendidikan Islam. seperti ketiadaan standar yang jelas serta lemahnya bidang administrasi. Yang menjadi pemikiran kalangan golongan Islam modern adalah bagaimana menghasilkan lulusan yang mampu menghadapi tuntutan zaman.

Dalam beberapa hal, khususnya mengenai sistem pendidikan, pemikiran golongan Islam modern juga mempengaruhi pesantren-pesantren. Disamping itu tuntutan zaman yang sedang dalam alam pembangunan memaksa pesantren bersifat lebih terbuka. Pengembangan wawasan keilmuan menuntut dimasukkannya metodologi pengajaran baru dan penyempurnaan kurikulum di pesantren.⁸⁾ Kesemuanya tetap berlandaskan tradisi yang ada dalam pesantren. Dengan kata lain, tujuan utama pembaharuan dalam pesantren adalah bagaimana mendinamisasikan pesantren agar lulusannya bisa terjun ke dalam masyarakat dengan berbekal tidak sekedar hanya ilmu agama.

Semangat pembaharuan pesantren tersebut diantaranya juga merasuki pikiran sekelompok ulama' tradisional di Sukabumi, Jawa Barat. Mereka mendirikan Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam (GUPPI)

7) Deliar Noer. "Gerakan Modern Islam 1940-1942". (Jakarta : LP3ES, 1980). Bab. I dan Bab. II

8) Ibid.

pada tanggal 2 Maret 1950. Sebagai suatu organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan Islam, GUPPI merupakan wadah gabungan profesi kerja spiritual yang berazaskan pada agama Islam dalam rangka perbaikan pendidikan Islam.

GUPPI didirikan untuk mengadakan perbaikan di bidang pendidikan Islam sehingga diharapkan pendidikan Islam dapat menyumbangkan peranan yang berarti dalam mengisi kemerdekaan. Latar belakang didirikannya GUPPI antara lain kesadaran akan suramnya bidang pendidikan Islam bisa dibandingkan dengan pendidikan umum yang telah menerobos masuk kedalam kehidupan masyarakat Indonesia. Apalagi sejak tahun 1950-an banyak pesantren mati, terutama sejak kebijaksanaan pemerintah untuk mengembangkan sekolah umum seluas-luasnya. Disamping itu jabatan-jabatan administratif modern lebih terbuka bagi lulusan-lulusan sekolah umum. Hanya pesantren-pesantren yang relatif besar yang dapat bertahan, itupun setelah memasukkan materi pendidikan umum dalam lingkungan pesantren.⁹⁾

Secara sosial basis massa GUPPI tumpang tindih dengan basis Partai NU, yaitu sama-sama pada massa Islam tradisional. Namun, walaupun basis massanya sama, GUPPI tetap mengambil posisi non-afiliatif terhadap partai NU. Sikap tersebut didasari oleh

9). Zamakheari Dlofir. "Tradisi Pesantren : Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai", Cetakan I (Jakarta : LP3ES. 1982)

pandangan para pendiri GUPPI yang melihat bahwa pendidikan Islam akan tetap terbengkelai jika tetap dicampur adukkan dengan politik. Sebagai organisasi kemasyarakatan yang berdiri sendiri, GUPPI kurang berkembang selama masa Orde Lama. Masalah utama yang dihadapi adalah situasi politik dalam negeri yang kurang menguntungkan, disamping masalah kesulitan dana yang juga tidak kurang pentingnya. Kecurigaan kaum ulama' tradisional di luar GUPPI dan tekanan PKI menyebabkan GUPPI menjadi organisasi yang kecil bahkan hampir mati.

Pada tahun 1970, pemerintah Orde Baru melihat GUPPI yang tengah sekarat sebagai organisasi yang dapat mewujudkan berbagai harapan pemerintah. Dengan mengikat pula, bahwa GUPPI sebagai organisasi Islam yang non-afiliatif terhadap partai politik manapun, maka dilakukan upaya menarik GUPPI. Pendekatan yang intensif dari Ali Murtopo sebagai penanggung jawab kemenangan Golkar dalam Pemilihan Umum 1971 dan dengan dukungan beberapa unsur Departemen Agama mengakibatkan GUPPI melepas posisi non-afiliatif. Disisi lain semangat modernisasi pesantren yang semakin kuat mendorong GUPPI untuk bergabung dengan Golkar, karena dengan masuk ke Golkar GUPPI berharap berbagai masalah kesulitan dana dimasa-masa sebelumnya seringkali jadi penghambat akan segera teratasi. Maka masuklah GUPPI ke dalam Golkar, selanjutnya

GUPPI berkembang dari tahun ke tahun, dari Pemilu ke Pemilu, dibawah Keluarga Besar Golongan Karya.

Melihat gambaran tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji perkembangan GUPPI sejak pertama kalinya organisasi tersebut masuk ke dalam Golongan Karya pada tahun 1971, khususnya perkembangan peranan politiknya. GUPPI ditarik karena dilatar belakangi dua pertimbangan pokok. Pertama, sasaran jangka pendek sebagai bagian strategi pemerintah Orde Baru dalam mengupayakan kemenangan Golkar pada Pemilu 1971. Kedua, sasaran jangka panjang untuk menguasai aspek kehidupan Islam melalui pendidikan Islam, sehingga diharapkan akan memperlancar hubungan antara pemerintah dengan beberapa kalangan Islam. Dengan demikian diharapkan GUPPI mendukung strategi pembangunan politik Orde Baru dan penataan struktur politik yang menunjang model strategi pembangunan yang menjadi pilihan Orde Baru.

Sejak bergabung dengan Golkar pada tanggal 28 Januari 1971, GUPPI berkesempatan memainkan peranan dalam bidang politik. Peranan politik GUPPI berangkat dari upaya untuk memperjuangkan kepentingan organisasinya : Perbaikan pendidikan Islam pada khususnya serta penegakan ajaran Islam pada umumnya. Disisi lain, sebagai bagian dari Keluarga Besar Golongan Karya, GUPPI dituntut untuk selalu mendukung berbagai kebijaksanaan pemerintah, sepanjang dipandang akan

menguntungkan GUPPI atau minimal tidak bertentangan dengan tujuan GUPPI. Walaupun tidak jarang lahir kebijaksanaan pemerintah yang bertentangan dengan tujuan GUPPI, namun sampai dengan pertengahan dasawarsa 1970-an GUPPI memainkan kedua peranan tersebut dengan baik. Artinya GUPPI banyak berperan dalam usaha-usaha menarik kalangan Islam di luar Golkar, dipihak lain GUPPI juga melakukan aktivitas-aktivitas untuk mempengaruhi berbagai kebijaksanaan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.

Setelah Pemilihan Umum 1971 membuktikan kemenangan mutlak bagi Golkar, pemerintah menunjukkan kepercayaan yang besar kepada GUPPI. Pemerintah menyadari peranan GUPPI yang cukup besar dalam menggalang massa pesantren dipedesaan. Selanjutnya, pemerintah menciptakan saluran-saluran struktural yang memungkinkan dikaitkannya GUPPI dengan sistem politik. khususnya dalam kaitannya dengan Departemen P&K dan Departemen Agama.¹⁰⁾ GUPPI diperkenankan mengikuti berbagai rapat untuk mendiskusikan berbagai rencana kebijaksanaan pemerintah yang akan dikeluarkan oleh kedua departemen tersebut.

Setelah Pemilihan Umum 1971 terjadi perkembangan menarik, GUPPI kerap bersikap keras dan kurang kompromi terhadap berbagai kebijakan pemerintah (khusus-

10) Heru Cahyono, *Op. cit.*, halaman 15

nya kebijaksanaan-kebijaksanaan Departemen Agama dan Departemen P&K) yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Terhadap kebijaksanaan pemerintah semacam itu, GUPPI melakukan penentangan yang dimanifestasikan kedalam berbagai bentuk. Dalam melakukan penentangan digunakan berbagai saluran untuk memperjuangkannya. dalam hal ini saluran-saluran terdekat adalah memperjuangkannya di dalam rapat-rapat di Departemen Agama dan Departemen P&K yang secara kontinyu diikuti GUPPI. GUPPI juga mempergunakan berbagai saluran informal dengan secara langsung berusaha mempengaruhi menteri-menteri yang bersangkutan, tokoh-tokoh pemerintah lainnya, atau langsung membicarakannya dengan Soejono maupun Ali Murtopo. Dengan melihat sepak terjang GUPPI yang kurang kompromi dengan pemerintah, praktis sejak tahun 1975 suara-suara keras GUPPI mulai banyak berkurang, walaupun tidak bisa disebut hilang sama sekali.

Pemerintah juga mulai memikirkan pendekatan yang lebih baik kepada Islam, sehingga tidak lagi mengandalkan kepada GUPPI semata. Tahun 1975 pemerintah mendorong lahirnya Majelis Ulama' Pusat, yang didalam organisasi ini pemerintah secara progresif meningkatkan pengaruhnya. Pemerintah tidak merealisasikan pembubaran GUPPI tetapi mulai memikirkan untuk mengurangi peranan politik GUPPI. Maka ketika tanggal 24 Mei 1978 Majelis Dakwah Islamiah Keluarga Besar

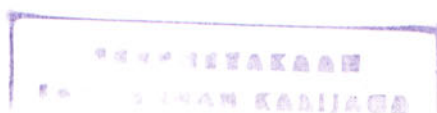
Golongan Karya (MDI Golkar) lahir, praktis peranan GUPPI tersaingi. Dan tidak lama kemudian Golkar menciptakan lembaga pengajian al-Hidayah. Satkar Ulama' dan Angkatan Muda Islam Indonesia (AMII). Namun, tidak seperti kelahiran MUI, kelahiran MDI menimbulkan banyak kontroversi. Dengan kelahiran MDI, terjadi perubahan mencolok dalam ADART GUPPI hasil Muktamar IV GUPPI tahun 1980, banyak peran GUPPI yang dikurangi sehingga GUPPI terdesak, sehingga hanya membidangi pendidikan Islam semata.¹¹⁾

Kehadiran GUPPI sebagai bagian Keluarga Besar Golongan Karya pada tahun 1971 mempunyai keuntungan timbal balik bagi Golkar dan GUPPI. GUPPI yang pada masa sebelumnya hampir-hampir menjauhi dunia politik, tetapi dalam perkembangan berikutnya ternyata terlibat sepenuhnya dalam aktifitas politik, disamping aktifitas dunia pendidikan. Keterlibatan GUPPI tersebut, bagi Golkar merupakan peluang untuk dapat merangkul suara pemilih dari kalangan umat Islam, terutama yang berada pada basis NU. Sebaliknya bagi GUPPI aktifitas politik GUPPI bersama-sama Golkar tentu kurang menguntungkan, karena basis yang dijadikan garapan oleh GUPPI adalah basis Islam tradisional yang selama ini selalu dibina oleh NU. Dengan demikian potensi massa NU akan terpecah : ke Golkar dan NU.

11). Ibid.. hal. 9

Dalam Pemilihan Umum tahun 1971 memberi kemenangan besar bagi Golkar. pemerintah Orde Baru memberikan kesempatan pada GUPPI agar berperan lebih aktif. Diciptakanlah kaitan struktural antara GUPPI dengan birokrasi pemerintah, khususnya Departemen Agama dan Departemen P&K. sehingga tercipta hubungan yang erat antara pemerintah dengan GUPPI. Selanjutnya dengan saluran tersebut pula diharapkan terjalinnya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dengan masyarakat Muslim. Pada mulanya, penciptaan saluran tersebut bertujuan untuk mempertemukan kurikulum pendidikan umum dengan pendidikan khusus (pendidikan Islam), namun pada perkembangan selanjutnya GUPPI juga turut aktif membahas masalah-masalah diluar bidang pendidikan. Pada masa-masa awal peran politik Golkar, GUPPI berkembang menjadi institusi keagamaan yang terpan-dang secara politik, namun kemudian ketika memasuki masa pertengahan dasawarsa 1970-an peranan politiknya semakin mengecil bersamaan dengan munculnya institusi tandingan yang seaspirasi dengan GUPPI. Dengan demikian yang muncul adalah, untuk apa pemerintah/Golkar mendekati GUPPI dan melahirkan MDI. Satkar Ulama' serta kelompok pengajian al-Hidayah ? Dan mengapa peranan politik GUPPI pada tahun 1971-1974 cukup besar ? Mengapa pula peranannya merosot sejak tahun 1975 ?

Dari inilah untuk dapat menjawab pertanyaan dalam wacana keterlibatan Golkar pada dakwah Islamiah



di Indonesia. Dari sinilah akhirnya penyusun menjadi tertarik untuk menelusuri serta membahas permasalahan tersebut yang selanjutnya akan penyusun tuangkan dalam bentuk skripsi.

C. RUMUSAN MASALAH

Seperti diketahui dalam latar belakang masalah tersebut diatas, maka ada tiga rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Sejauh manakah keterkaitan antara aktivitas dakwah dengan politik ?
2. Kebijakan-kebijakan apakah yang telah diambil Golkar dalam dakwah Islamiah ?
3. Motif-motif apakah yang mendorong Golkar terlibat dalam kegiatan dakwah Islamiah tersebut ?

Dari tiga pokok permasalahan yang masih global tersebutlah berangkatnya studi pembahasan ini.

D. TUJUAN PENELITIAN

Akan halnya tentang tujuan studi ini minimal ada tiga tujuan dari segala kepayahan penyusun skripsi ini. Namun patutlah dicatat sebelumnya, bahwa tujuan ini diatas segalanya, adalah ikhlas akademis dan tak berupaya mengada-ada. Tujuan itu adalah sebagai berikut : Pertama, belajar secara kritis pada organisasi partai politik, yakni Golkar yang sampai saat ini sumbangan-sumbangan yang berupa fisik

maupun non fisik masih terasa sekali manfaatnya terhadap dakwah Islamiah. Kedua, untuk mendiskripsikan pesan-pesan dakwah Golkar, terutama GUPPI dan MDI yang peranannya sampai saat ini mengalami degradasi peran. Ketiga, Mengukir cakrawala pemikiran politik dikalangan intelektual Muslim pada umumnya, serta juga mengilustrasikan dinamika praktis politik Islam yang mengambil porsi utama pada pergerakan di abad ke-20. Dan darinya diharapkan memberikan suatu wawasan yang tak picik malah diharapkannya tumbuhnya generasi yang kritis, dinamis dan moderat.

Dan lebih dari itu, semoga kajian yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi almamaterku tercinta. Diatas segalanya, hanya karena Allah-lah segala jerih payah ini diabdikan.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai pedoman untuk pembentukan kestabilan sikap mental dalam hidup beragama, dan bernegara.
2. Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, pemerintah, ulama', cendekiawan muslim, politisi Islam dalam menyusun kebijaksanaan yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut serta hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dokumentasi disamping juga di harapkan dapat menambah khasanah bekal dakwahsecara tertulis.

F. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIK

Dalam penelitian ini kerangka teori yang dijadikan acuan meliputi :

1. Teori Dakwah

Dakwah adalah ajakan kepada manusia dengan cara yang bijaksana untuk menuju kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan bersama di dunia dan di akhirat. Dakwah berarti mengajak manusia untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Tuhan, yaitu menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Prinsip perintah dan larangan dari Tuhan supaya dapat menjadi atau mewarnai setiap langkah atau setiap perbuatan dalam hidup dan kehidupan manusia di masyarakat. Tuhan SWT telah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menyeru umat manusia ke jalan-Nya (Yusuf : 108). Dalam menyeru umat manusia itu ke jalan Tuhan SWT, Nabi beserta para pengikutnya bersandar pada keterangan-keterangan yang jelas (*bashiroh*), dan sambil memuji kesucian Tuhan SWT. Nabi menegaskan bahwa beliau bukan tergolong orang musyrik. Maka dakwah dalam ayat ini ialah *ad-da'waha ila Allah (ad'u ila Allah)*, yaitu seruan, ajakan, panggilan dan imbauan kepada

Allah SWT. kembali kepada Allah SWT.¹²⁾

Allah SWT juga menegaskan bahwa tidak ada perkataan yang lebih baik daripada menyeru kepada Allah dan melakukan amal sholeh serta menyatakan diri sebagai orang Islam, orang yang berserah diri kepada Allah (Fusilat : 33). Dalam ayat ini pun dakwah berarti dakwah *ila Allah* dianjurkan pula supaya seorang muslim menyatakan identitasnya sebagai muslim secara jelas, agar tidak dijumpai dengan seorang musyrik. Penegasan ini perlu, karena kaum politeis (*musyrikun*) juga berusaha mengembangkan dakwahnya.

Al-Qur'an juga secara imperatif menyuruh setiap Muslim untuk menyeru umat manusia ke jalan Tuhan dengan jalan bijaksana, dengan nasehat yang baik dan argumentasi yang jitu (An-Nahl : 125). Ayat ini menunjukkan kepada kita cara-cara yang baik untuk mengajak hamba-hamba Allah ke jalan-Nya, dan tidak ada sedikitpun konotasi bahwa dakwah *ila Allah* atau dakwah *ila sabilillah* dianjurkan lewat paksaan, apalagi kekerasan. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa setiap Muslim pada hakekatnya berkewajiban untuk melakukan dakwah, supaya kebenaran agama yang telah ia terima dapat dinikmati orang lain. Kebenaran Islam bukan hanya

12) Amin Rais. "Cakrawala Islam Antara Cita Dan Fakta", Cetakan I (Bandung : Mizan, 1987), hal. 24

bersifat teoritis demikian menurut almarhum Ismail al-Farudi. melainkan juga bersifat aksiologis dan praktis. Kebenaran inilah yang harus ditularkan seluas-luasnya kepada masyarakat manusia dengan sikap dan pandangan yang bijak, nasehat yang indah, dan argumentasi yang kukuh.

Dakwah juga berarti, Islamisasi seluruh kehidupan umat manusia. Menurut Muhammad Naquib al-Attas, Islamisasi adalah proses pembebasan manusia, pertama-tama dari segenap tradisi yang bersifat magis, mitologis, animistik dan budaya nasional yang irrasional. Kemudian berarti juga pembebasan manusia dari pengaruh sekuler yang membelenggu pikiran dan perilakunya. Sekulerisme adalah manifestasi jahiliyah ditinjau dari pandangan Islam.

Dengan pemahaman dakwah seperti diatas, tampak semakin jelas bahwa dakwah memang berwatak progresif, bahkan revolusioner. Dakwah tidak akan dapat menerima *status quo* yang bertentangan dengan tuntunan wahyu atau ajaran-ajaran agama. Dakwah adalah gerakan *simultan* dalam berbagai bidang kehidupan untuk mengubah *status quo* agar nilai-nilai Islam memperoleh kesempatan tumbuh subur, demi kebahagiaan seluruh umat manusia. Dakwah merupakan rekonstruksi masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.

2. Politik

Salah satu karakteristik agama Islam pada masa-masa awal penampilannya ialah, kejayaan di bidang politik. Penuturan sejarah Islam dipenuhi oleh kisah kejayaan itu sejak Nabi Muhammad SAW itu sendiri (periode Madinah) sampai masa-masa jauh sesudah beliau wafat. Terjalin dengan kejayaan politik itu adalah sukses yang *spektakuler* ekspansi militer kaum muslimin. Maxim Rodenson, seorang marxis ahli Islam, menegaskan bahwa agama Islam menyuguhkan kepada para pemeluknya suatu proyek kemasyarakatan, suatu program yang harus diwujudkan di muka bumi. Karena itu, kata Rodenson agama Islam tidak bisa disamakan dengan agama Kristen, atau Budhisme, sebab Islam tidak hanya menampilkan dirinya sebagai perhimpunan kaum beriman yang mempercayai kebenaran yang satu dan sama, melainkan juga sebagai masyarakat yang total.¹³⁾

Kenyataan historis menjadi dasar bagi adanya pandangan yang merata di kalangan para ahli dan awam baik Muslim dan Non Muslim, bahwa Islam adalah agama yang berkaitan erat dengan kenegaraan. Bila kita perhatikan secara lebih umum hubungan antara agama dan politik, pertama-tama

13) Ahmad Syafii Ma'arif, "Islam dan Masalah Kene-garaan", Cetakan I (Jakarta : LP3ES, 1985), hal. 1

yang harus dipertimbangkan adalah kedudukan agama dalam kehidupan masyarakat. Jika seandainya agama bagi seseorang berarti sesuatu yang tidak selalu berarti sekedar anutan nama saja, maka ada dua hal yang harus ditekankan. Pertama, pemikiran keagamaan akan membentuk kerangka intelektual di dalam segala kegiatannya. Di dalam konteks yang lebih luas kegiatan-kegiatan itu akan menjadi berarti dan pertimbangan akan adanya hubungan itu dapat mempengaruhi gambaran umum dari kehidupannya dengan cara-cara tertentu. Kedua, karena agama membawa suatu kesadaran akan keadaan yang lebih luas, dimana tujuan hidup seseorang telah diletakkan dan ditentukan, sehingga hal itu seringkali dapat menggerakkan motif-motif kegiatannya. Sebenarnya tanpa motif-motif yang diberikan oleh agama tersebut, kegiatan-kegiatan itu tidak akan mungkin dapat dilaksanakan.¹⁴⁾

Dari dua hal di atas, dapat terlihat bahwa agama mempunyai kedudukan sentral dalam kehidupan seseorang, bukan karena agama mempertimbangkan hal-hal yang begitu mendetail, (meskipun dalam beberapa keadaan demikian), akan tetapi karena agama memberikan tujuan umum kehidupan dan membantu memusatkan energinya dalam usaha untuk

14) W. Montgomery Watt, "Pergolakan Pemikiran Politik Islam", Cetakan I (Jakarta : Beunebi Cipta, 1987), hal. 34

menempuh tujuan-tujuan tersebut.

Telah disebut bahwa politik selalu berkaitan dengan kekuasaan (*Power*) dan sebagaimana dikatakan oleh V. O. Key Junior, politik terutama terdiri atas hubungan antara sub-ordinasi antara dominasi dan super ordinasi antara dominasi dan sub misi, antara yang memerintah dan yang diperintah. Sedangkan George Catlin memberi takrif sebagai kegiatan manusia yang berkenaan dengan tindakan manusia dalam mengontrol masyarakat (*the act of human social control*). Harold Lasweel memeberikan pengertian yang lebih jelas, menurutnya, politik menyangkut *who get what, when and how. What* di sini terutama berupa kekuasaan atau otoritas politik. Sedangkan siapa, kapan, dan bagaimana adalah masalah-masalah yang menentukan bentuk pengelolaan politik suatu masyarakat.¹⁵⁾

Politik kepartaian, proses rekrutmen pejabat atau pegawai, proses agregasi dan artikulasi kepentingan, proses pemecahan konflik-kepentingan antar golongan dalam masyarakat, proses pembuatan keputusan politik domestik maupun luar negeri dan lain sebagainya adalah, contoh-contoh kegiatan politik yang tidak dapat dilepaskan dari fondasi moral dan etika yang dianut. Bagi seorang marxis,

15) Amin Rais, *Op. cit.*, halaman 30

suatu tindakan politik adalah baik bila tindakan itu menguntungkan kaum proletar, memperlemah posisi golongan yang mereka namakan kaum borjuis, dan menuju revolusi sosial ke arah masyarakat tanpa kelas. Bagi seorang sekularis pragmatis, suatu tindakan politik adalah baik jika dapat memberi keuntungan praktis dan manfaat material, walaupun hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sesaat. Sedangkan untuk seorang muslim, suatu tindakan politik adalah baik kalau ia berguna bagi seluruh rakyat, sesuai dengan ajaran *rohmatan lil 'alamin*.¹⁶⁾

Dengan demikian, menurut tinjauan Islam ada dua jenis politik, yaitu politik kualitas tinggi (*high politics*) dan politik kualitas rendah (*low politics*). Lebih lanjut Amin Rais mengatakan setidaknya ada tiga ciri yang harus dimiliki dalam politik kualitas tinggi, atau mereka yang menginginkan terselenggaranya *high politics*.

Pertama, setiap jabatan politik pada hakekatnya merupakan amanah dari masyarakat, yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Amanah itu tidak boleh disalahgunakan, misalnya untuk memperkaya diri sendiri atau menguntungkan golongannya saja dan menelantarkan kepentingan umum. Kekuasaan harus

16) Ibid., halaman 30

dipandang sebagai nikmat yang dikaruniakan oleh Allah untuk mengayomi masyarakat, menegakkan keadilan, dan memelihara tertib sosial yang egalitarian. Kekuasaan betapapun kecilnya harus dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan bersama, sesuai dengan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat luas. Setiap orang sesungguhnya memiliki kekuasaan tertentu, entah ia duduk di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif atau bahkan dalam kelompok penekan, atau pemegang posisi kunci dalam suatu organisasi.

Kedua, erat dengan yang pertama, setiap jabatan politik mengandung pertanggungjawaban (*mas'ulliah, accountability*). Sebagaimana diajarkan oleh Nabi, setiap orang pada dasarnya pemimpin yang harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya atau tugas-tugasnya. Kesadaran tanggung jawab ini sangat menentukan penyelenggaraan politik kualitas tinggi. Tetapi, tanggungjawab ini bukan hanya terbatas di hadapan institusi atau kelembagaan yang bersangkutan, melainkan juga dihadapan Allah yakni mahkamah yang paling adil, kelak di akhirat tanggung jawab inilah justru yang lebih penting.

Ketiga, kegiatan politik harus dikaitkan secara ketat dengan prinsip ukhkuwah Islamiah yakni persamaan di antara umat manusia. Dalam arti

luas ukhuwah melampaui batas-batas etnik, rasial, agama, latar belakang sosial, keturunan dan sebagainya. Masalahnya, setiap orang dari latar belakang manapun ia jika dipukul pasti merasa sakit, jika tidak makan pasti merasa lapar dan seterusnya. Karenanya itu kegiatan politik konfrontatif yang penuh dengan konflik dan melihat golongan lain sebagai pihak yang harus dieliminasi. Sebaliknya gaya politik yang ditempuh adalah yang penuh dengan ukhuwah, mencari saling pengertian dan membangun kerja sama keduniaan seoptimal mungkin dalam rangka menunaikan tugas-tugas kekhilafahan.

Politik kualitas tinggi dengan ciri-ciri minimal tersebut sangat kondusif bagi pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*. Agaknya inilah antara lain yang dimaksudkan dalam Surat Al-Haj ayat 41 :

الَّذِينَ إِنَّمَلِكُهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya : Mereka adalah orang-orang yang bila kami beri kekuasaan yang teguh di muka bumi, niscaya menegakkan sholat dan membayar zakat dan menyuruh manusia berbuat kebaikan serta mencegah kejahatan, dan bagi Allah sajalah kembalinya segala urusan.

Dalam kenyataannya, politik kualitas tinggi

memang terasa sangat ideal . tidak saja di negara-negara berkembang, melainkan juga di negara-negara maju.

Politik kualitas rendah pada umumnya justru dominan di negara-negara berkembang dan di negara-negara Muslim. Dalam pembicaraan sehari-hari, kita sering mendengar istilah *Politics Machiavellis* dengan konotasi yang tidak sehat penuh hipokrasi, kelicikan dan sebagainya. Dalam bukunya *The Prince* disebutkan ciri-ciri politik kualitas rendah.

Pertama, Machiavalli mengajarkan bahwa kekerasan (*violence*), brutalitas dan kekejaman merupakan cara-cara yang seringkali perlu diambil penguasa. Malahan ada seorang ahli yang mengatakan, Machiavalli adalah guru dalam "pengelolaan kekerasan" Baginya kekerasan, brutalitas dan kekejaman dapat digunakan kapan saja, asalkan tujuan yang dikejar tersebut bisa berhasil dicapai. Karena inilah terkenal semboyan "tujuan menghalalkan segala cara" Pandangan seperti ini mendorong manusia yang bergerak dalam bidang politik menjadi tegalan atau tegean, dan menjadi manusia berdarah dingin. Melangkahi mayat orang lain untuk mencapai tujuan sendiri dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Kekuasaan sebagai amanah dan nikmat dari Tuhan yang harus dipergunakan sebaik-baiknya, tidak dikenal sama sekali dalam ajaran ini.

Kedua. penaklukan total atas musuh-musuh politik dinilai sebagai kebijakan puncak. Musuh tidak boleh diberi kesempatan untuk bangkit. Bahkan kalau perlu diperlakukan sebagai barbagai, bukan sebagai manusia. Politik semacam ini, yang berintikan pada perjuangan untuk merebut kekuasaan (*struggle of power*) dan menguasai pemerintahan, biasanya disebabkan oleh nafsu-nafsu manusia yang tidak mengenal batas. Oleh sebab itu pihak yang sedang berkuasa, kata machiavelli harus melakukan penindasan dan penekanan serta penaklukan terhadap musuh-musuh politik. Karena, sekali lagi, penaklukan adalah suatu *summum bonum* (kebaikan-puncak).

Ketiga. dalam menjalankan kehidupan politik seorang penguasa harus dapat bermain seperti binatang buas, terutama seperti singa sekaligus sebagai anjing pemburu. Kebiasaan singa akan membikin takut serigala, sedangkan kecerdikan dan kelicikan anjing pemburu dapat menghindari pelbagai jebakan. Seorang penguasa harus dapat menjadi anjing pemburu untuk mengenali pelbagai perangkap dan harus bisa menjadi singa untuk menggertak manusia-manusia serigala.¹⁷⁾

Politik kualitas-rendah gaya Machiavilli ini

17). Ibid.

mudah diserap. karena naluri-naluri dan nafsu rendah manusia ditampung secara luas. Dan ditinjau dari sudut pandang Islam. politik semacam ini tidak mendukung maksud-maksud dakwah. malah justru menjegal dakwah. merusak masyarakat Islami.

Ilustrasi inilah yang menjadikan. bahwa politik kualitas-tinggi yang dapat berjalan paralel dan harmonis dengan tujuan besar dakwah. Politik kualitas-tinggi inilah yang dikehendaki oleh Islam. Bila dihadapkan dengan kenyataan yang merajalelanya politik kualitas-rendah di tengah masyarakat. kita lantas menghadapi pelbagai masalah dilematis. Memainkan politik kualitas-tinggi di tengah samudra politik kualitas-rendah memang tidak gampang. apa lagi di zaman yang modern dewasa ini. bidang politik memang harus diterjuni secara profesional. dan tidak sela- yaknya dimasukkan secara amatiran. Tetapi. profesi politik yang dimaksud di sini bukan sebagaimana dimengerti oleh sementara orang yaitu bahwa "tugas" pokok kaum politisi adalah menipu.

3. Motivasi

Motivasi biasanya timbul pada diri setiap orang karena disebabkan adanya keinginan masing-masing pribadi yang didorong oleh cita-cita untuk meraih keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

3.1. Pengertian Motivasi

Motivasi berasal dari kata motive yang menurut Fill More H Sand Ford berarti "Kondisi yang' menggerakkan suatu makhluk yang mengarah kepada suatu tujuan atau beberapa tujuan dari tingkat tertentu.¹⁸⁾

Sedangkan Sarlito Wirawan Sarwono memberi pengertian motivasi "suatu rangsangan atau dorongan atau pembangkit tenaga terjadinya tingkah laku.¹⁹⁾

Dalam Islam motivasi juga disebut dengan niat, yang diartikan oleh para ahli fiqh sebagai suatu kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan berbarengan dengan dimulainya pelaksanaan.²⁰⁾ Disamping itu dalam ilmu bahasa arab menciptakan arti niat suatu tujuan untuk merealisasikan perbuatan atau istilah lainnya *qashad*.²¹⁾ Dr. Singgih Dirgantunarsa berpendapat :

Motive sendiri artinya : dorongan atau kehendak jadi yang menyebabkan timbulnya semacam kekuatan agar seseorang itu berbuat atau bertindak, dengan perkataan lain bertingkah laku. Karena tingkah laku

18) H.M. Arifin M.. **Psikologi Dakwah**. (Jakarta : Bumi Aksara, 1990). hal. 49

19) Sarlito Wirawan Sarwono. **"Pengantar Umum Psikologi"**. (Jakarta : Bulan Bintang, 1985). hal. 56

20) Fatchurrahman. **"Haditsun Nabawy"**. (Kudus : Menara, tt). hal. 5

21). **Ibid..** hal. 3

tersebut dilatar belakangi adanya motive maka disebut sebagai tingkah laku bermotivasi.²²⁾

Drs. Sidi Gazalba juga berpendapat bahwa "Motif merupakan sebab. Tujuannya adalah akibat. Motif mendorong kita untuk bertindak atau melakukan sesuatu.²³⁾ Sedangkan kalau menurut Prof. Dr. Hasan Langgulung :

Motivasi adalah keadaan psikologis yang merangsang dan memberi arah terhadap aktifitas manusia. Dialah kekuatan yang menggerakkan dan mendorong aktifitas seseorang. Motivasi seseorang itulah yang membimbingnya kearah tujuan-tujuannya.²⁴⁾

3.2. Macam-macam Motivasi

Banyak ahli psikologi membagi motif menjadi bermacam-macam. di antaranya :

- a. Motif yang mendorong aktivitas pribadi yang menurut Gold Stein disebut Self actualization. Dorongan ini dibagi menjadi dua yaitu motif yang menuntut pemenuhan jasmaniah dan motif yang menuntut pemenuhan rohaniah.
- b. Motif kepada keamanan yang disebut security motif. Motif ini oleh para ahli jiwa dianggap motif yang paling asasi. Motif ini mendorong seseorang untuk melindungi dirinya dari segala macam ancaman. Perwujudan dari motif ini adalah menghindari dari bahaya. Selanjutnya security motif dibagi menjadi dua yaitu :
 1. Motif fisiologis. yaitu dorongan untuk pemenuhan jasmaniah.
 2. Motif kepada kepercayaan dan konformitas. Menurut H. Bonner bahwa keper-

22) Dr. Singgih Dirgagunarsa. "Pengantar Psikologi" (Jakarta : Mutiara, 1978), hal. 92

23) Drs. Sidi Gazalba. "Asas Kebudayaan Islam". (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), hal. 92-93

24) Prof. Dr. Hasan Langgulung. "Teori-teori Kesehatan Mental", (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986), hal. 53

- cayaan kepada yang ghaib merupakan tenaga motivasi yang sangat kuat.
- c. Motif untuk mengadakan respon.
 - d. Motif-motif yang bersifat individual ini untuk mendapatkan suatu pengakuan dari kelompoknya.
 - e. Motif yang mendorong untuk mencari pengalaman baru dalam hal ini biasanya mendorong manusia untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan.²⁵⁾

Perintah agama, misalnya pada point 2 diatas adalah dorongan pada manusia untuk berbuat kebaikan agar nantinya di hari akherat kelak mendapatkan pahala (surga). Di Mesir Muhammad Abduh dengan nilai-nilai modernisme Islam menjadi suatu senjata yang ampuh mengusir penjajah Inggris untuk meninggalkan Mesir. Demikian juga di Indonesia, nilai-nilai Islam merupakan bagian yang penting dalam perjuangan kemerdekaan dan mengusir penjajah.

Di samping itu Abraham Maslow membagi motivasi manusia berdasarkan kebutuhan dasar manusia (*basic need*), yaitu :

- a. Kebutuhan fisiologik
- b. Kebutuhan perasaan aman (*safety need*)
- c. Kebutuhan akan cinta Kasih atau kebutuhan memiliki dan dimiliki (*love and belonging*)
- d. Kebutuhan untuk mengetahui atau mengartikan sesuatu (*desire and to know and to understand*)
- e. Kebutuhan penghargaan (*esteem*)
- f. Kebutuhan akan tingkah laku tanpa hambatan sesuai dengan dirinya sendiri (*self actualization*)²⁶⁾

25). H.M. Arifin M. Op. cit., hal. 58-63

26). Sarlito Wirawan Sarwono, Op. cit., hal. 64

Sedangkan WA. Gerungan membagi motif menjadi tiga yaitu :

- a. Motif *bio genetis*. yaitu motif yang berkembang pada diri orang dan berasal dari organisme sebagai makhluk biologis
- b. Motif *sosio genetis*. yaitu motif yang dipelajari orang dan berasal dari lingkungan kebudayaan tempat orang berada dan berkembang.
- c. Motif *theo genetis*. yaitu motif yang berasal dari interaksi antara manusia dengan Tuhan seperti yang nyata dalam ibadahnya dalam kehidupan sehari-hari.²⁷⁾

Berbagai pengertian tentang motifasi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa moti-vasi merupakan dorongan dan tenaga penggerak lainnya yang berasal dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan. Motivasi seseorang timbul karena adanya berbagai rangsangan dari luar (extern), yaitu tujuan atau pemenuhan kebutuhan. Motifasi bersifat alam. artinya sewaktu manusia di lahirkan telah membawa motif-motif tertentu. Akan tetapi setelah manusia mengenal kebutuhan dan mengalami pertumbuhan maka motifasi manusia mengalami perkembangan juga. Sehingga munculnya suatu motifasi tidak terlepas dari faktor lain yang menyebabkan seseorang untuk melakukan perbuatan. Motivasi itulah yang memberi arah dan tujuan kepada

27). WA. Gerungan. Op. cit.. hal. 142-143

suatu perbustan.

Ilustrasi inilah yang menjadi bahan renungan bagi penulis. dan mencoba mengadakan penelitian melalui penelusuran buku-buku. dokumen serta menyingkap wawasan berfikir para ulama. politisi. Untuk kemudian mencoba memformulasikan suatu gagasan umum tentang perlunya usaha dan upaya mengaktualisasikan dakwah Islamiah melalui politik praktis Golongan Karya.

G. METHODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Di dalam menyusun skripsi ini penyusun mengambil obyek penelitian utamanya adalah buku-buku yang tersedia (*Literair*) dan wawancara (*interview*).

2. Metode Pengumpulan Data

Penelusuran bahan dokumen dan buku-buku. yaitu cara memperoleh data tentang sesuatu dengan menelusurinya pada dokumen yang ada dan buku-buku yang tersedia.

3. Metode Analisa Data

Di dalam menganalisa data. penyusun menggunakan metode kualitatif. yaitu cara menganalisa data berupa data-data kualitatif yang berupa :

a. Metode Induksi : yaitu menganalisa data-data

husus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan umum.

b. Metode Deduksi : yaitu memberikan bukti-bukti khusus terhadap suatu pengertian umum yang ada sebelumnya (umum-khusus)

c. Metode komparasi : yaitu cara menganalisa data-data yang berbeda-beda dengan cara membandingkan untuk diketahui mana yang lebih kuat (benar), atau untuk mengkompromikannya.

Dalam penulisan studi ini, penulis menuangkan uraian sistematika pembahasan ke dalam tiga Bab minus pendahuluan dan penutup yang mengawali dan mengakhiri studi ini. Adapun rincian dari sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan diuraikan penegasan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran teoritik, metode dan tehnik penelitian.

Bab kedua, ini membicarakan keterkaitan dakwah dengan politik, terdiri dari tiga bagian, pertama, dakwah Islam, politik itu sendiri, serta hubungan antara politik dan dakwah yaitu politik sebagai alat dakwah dan profesionalisme politik.

Bab ketiga, membicarakan secara khusus mengenai Golongan Karya, terdiri dari dua bagian, pertama, "Sejarah Berdirinya Golongan Karya", sebuah paparan

bagaimana ia lahir dan menjadi organisasi politik terbesar pada masa Orde Baru. kedua. membicarakan tentang "Golkar dalam Pemilu-Pemilu". ketiga. kontribusi Golkar terhadap dakwah Islamiah. GUPPI dan MDI dan keempat. motivasi Golkar dalam beraktivitas.

Bab keempat. bab ini merupakan bab penutup yang berisi. kesimpulan. saran-saran serta lampiran-lampiran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Golongan Karya (Golkar) sebagai kekuatan sosial politik terbesar di Indonesia menyadari, bahwa sejak berdiri hingga masa pemilu-pemilu Orde Baru dalam perolehan suara mengalami kenaikan dan penurunan.

Pada pemilu di masa permulaan Orde Baru atau sekitar tahun 1971, Golkar memperoleh suara 62,80% (34.348.673). akan tetapi pada tahun 1977 perolehan suara Golkar mengalami penurunan sekitar 0,7% sehingga hanya memperoleh 62,11%, dan pada tahun 1982, Golkar tetap dapat mempertahankan posisinya sebagai pengumpul suara terbanyak, yaitu 64,3% suara dari 74.966.344 suara. Pada tahun 1987 Golkar berhasil mengumpulkan 73,2% atau kurang lebih 67.783.680 suara atau mengalami kenaikan 8,9%. Pada tahun 1992, Golkar tidak berhasil mempertahankan persentase perolehan suaranya karena Golkar hanya berhasil memperoleh 68,1% dari 97.789.534 suara.

Dalam Pemilu 1971, yang merupakan Pemilu pertama di jaman Pemerintah Orde Baru, Golkar praktis merupakan pendatang baru dalam blantika Pesta Demokrasi tersebut. Ada beberapa pihak terutama dari kalangan Parpol sangat memandang enteng keikutsertaan Golkar sebagai kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan

komunikasi politik Golkar terhadap "*Grass root level of the people*" (dari kalangan masyarakat bawah). Karena merasa memiliki "tancapan akar" yang kuat ke bawah, NU (Nahdlotul Ulama), Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) dan PNI (Partai Nasional Indonesia) merasa sangat yakin akan keluar sebagai kontestan pemenang dalam Pemilu.

Dalam kenyataannya, hasil Pemilu tahun 1971 membuyarkan angan-angan mereka. NU dan PNI, dua Parpol yang mewakili kebesaran partai masa lampau, ternyata masing-masing hanya mampu menggaet suara sebanyak 18,67% dan 6,94%. Parmusi sedikit berada di bawah PNI, dengan perolehan suara 5,63%. Di luar dugaan, Golkar tampil sebagai pemenang dengan menyabet 62,80% perolehan suara.

Keberhasilan Golkar untuk pertama kalinya tampil sebagai kontestan Pemilu 1971 jelas tidak terlepas dari peran Trikarya (SOKSI, MKGR dan KOSGORO). Kelompok ini merupakan "pilar utama" yang menopang keberadaan Golkar, disamping Kelompok Induk Organisasi (KINO) lainnya seperti; Ormas Hankam, Karya Profesi, Gakari, dan Karya Pembangunan.

Sebelum Golkar lahir pada tanggal 20 Oktober 1964, Trikarya, sudah lebih dahulu menghirup "udara politik" di tanah air. Dari ketiga Trikarya, Kosgoro lebih dahulu terbentuk sekitar tahun 1957 dengan Mayor Isman sebagai Ketuanya. Anggota-anggota Kosgoro

umumnya berasal dari TRIP yang terlibat dalam pertemuan di Surabaya. Tujuan utama dari organisasi ini adalah memberikan bantuan praktis terhadap masyarakat dengan menekankan pola kerjasama gotong royong. Bidang-bidang yang digarap meliputi; kesehatan, agama, pendidikan dan produksi makanan.

Setelah Kosgoro, beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1960, Kolonel Sugandhi membentuk MKGR. Kegiatan organisasi ini meliputi bidang-bidang seperti agama, sosial, pendidikan dan kebudayaan.

Pada tahun yang sama, tepatnya tanggal 20 Mei 1960 Kolonel Suhardiman membentuk SOKSI. Awal mulanya SOKSI dibentuk dari suatu organisasi yang bernama Karyawan Perusahaan Negara. Potensi organisasi ini cukup besar, terutama di perusahaan-perusahaan perkebunan negara yang memiliki karyawan puluhan sampai ratusan ribu.

Dari beberapa Pemilu yang telah diselenggarakan, peranan Trikarya sangat besar dalam ikut menghantarkan Golkar sebagai *Single Majority*. Hal ini tidak lain disebabkan kharisma yang kuat dari para pendirinya, serta kemampuan organisasi dalam melakukan kegiatan kongkrit bagi massa anggotanya. Tapi dalam Pemilu tahun 1992, ada kesan bahwa peranan Trikarya sedikit mengendur. Di lain pihak muncul OKP (Organisasi Kelompok Pengikut) seperti FKPPI (Forum Kumuni-

kasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia) yang lebih merepresentasi, dan lebih dekat aksesnya dengan para pengambil keputusan. Pada sisi lain organisasi seperti GUPPI, MDI, dan Pengajian al-Hidayah dianggap cukup efektif untuk menggali dukungan dari masyarakat terhadap Golkar.

Kemenangan Golkar dalam pemilu pertama tahun 1971 yang cukup spektakuler, sebenarnya adalah hasil dari perjuangan ormas-ormas lain seperti GUPPI, bahkan bisa dikatakan Golkar akan sulit sekali memenangkan perolehan "suara Islam" tanpa GUPPI.

Dalam pendekatan kepada massa Islam, Golkar menggunakan isu modernisasi pesantren sebagai tema sentral. Perjuangan dan kampanye GUPPI menjelang pemilihan umum 1971 harus dikaitkan relevansinya dengan gagasan tentang suatu harapan pada masa depan, dimana dijanjikan akan dilakukannya perbaikan di bidang pendidikan Islam, madrasah-madrasah dan pondok pesantren. Melalui GUPPI, pesantren-pesantren di bina dalam hal cara-cara mengadakan perbaikan pendidikan Islam. Kepada mereka langsung diintroduksi cara mengatasi kesulitan dana, yaitu dengan masuk GUPPI. Pondok-pondok pesantren diyakinkan bahwa dengan masuk GUPPI mereka akan segera mendapat jalan untuk memperoleh dana.

Hasbullah Bakri, salah seorang juru kampanye Golkar dari GUPPI yang cukup diandalkan dan dipercaya

mengidentifikasi bahwa di daerah yang termasuk "wilayah relegius" seperti Padang, Pariaman, Agam, dan 50 Kota di Sumatra Barat, ada lima hal isi kampanye yang biasanya dikemukakan ulama-ulama GUPPI untuk menjawab satu tema pokok yaitu "Apa sebabnya umat Islam perlu menyokong GUPPI/Golkar ?". Kelima hal tersebut adalah : *Pertama*, Golkar melakukan pembangunan yang nyata dan bermanfaat, dan apa yang dinamakan pembangunan oleh Golkar itu, di dalam terminologi Islam dapat disebut "amal saleh". *Kedua*, Golkar ingin menghilangkan bekas-bekas dan hasil-hasil yang negatif dari aktivitas parpol dalam membina pemerintah negara selama ini, dalam hal ini adalah perjuangan ideologi politik. *Ketiga*, Golkar mempunyai rencana pembangunan yang menuju masyarakat adil dan makmur, yang telah dibuktikan pelaksanaannya tidak sekadar omong kosong. *Keempat*, Golkar jelas mempunyai rencana yang baik terhadap pembangunan Islam di Indonesia. Ini nyata terlihat pada rangkulannya terhadap GUPPI. Karena Golkar dan GUPPI punya rencana khusus guna perbaikan pendidikan Islam. *Kelima*, tidak ada satupun alasan yang bisa menghalangi umat Islam untuk menyokong Golkar.

Setelah masuk Golkar, GUPPI berkesempatan untuk berperan dalam dunia politik, baik untuk kepentingan penguasa maupun untuk kepentingan organisasi. Namun demikian GUPPI tidak lalu bersifat eksklusif, artinya

seluruh aktivitasnya hanya menyangkut soal mengambil tindakan politik saja. Aktivitas politik GUPPI hanya bersifat *parsial* saja, artinya kegiatan politik hanyalah merupakan salah satu bagian dari aktivitasnya, walaupun sering melancarkan tekanan kepada pemerintah, akan tetapi GUPPI pada dasarnya lebih berpedoman pada tujuan-tujuan yang lebih besar, yaitu pendidikan Islam.

Peranan politik GUPPI pada tahun 1971 sampai 1974 cukup besar dikarenakan *pertama*, Konsesi yang diberikan pemerintah kepada GUPPI sangat besar. Konsesi pemerintah antara lain ditandai dengan adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang bersifat menguntungkan GUPPI, penciptaan saluran-saluran struktural (baik formal maupun informal) yang memungkinkan dikaitkannya GUPPI dengan para pembuat keputusan politik utama. *Kedua*, kekuatan internal GUPPI adalah segala kondisi internal organisasi GUPPI yang berkaitan dengan kemampuan GUPPI dalam memainkan peranan politiknya. Kekuatan internal GUPPI bersumber dari kualitas anggota, jumlah anggota, dan kesatuan organisasi. Ketika tahun 1971-1974, GUPPI dikendalikan oleh para pimpinan yang kurang kompromis maka peranan politik GUPPI besar, sebaliknya ketika tahun 1975-1980, GUPPI dikendalikan oleh para pimpinan yang lebih bisa berkompromi dengan pihak pemerintah maka peranan politik GUPPI semakin mengecil. Ketika tahun

1971-1974 kesatuan organisasi relatif kohesif maka peranan politik GUPPI besar, sebaliknya ketika 1975-1989 kesatuan organisasi mengendur (tidak kohesif) maka peranan politik GUPPI semakin merosot. *Ketiga*, konstelasi politik nasional adalah peta kekuatan politik di antara elit-elit penguasa politik yang berkaitan dengan keberadaan GUPPI serta peranan politik GUPPI. Konstelasi politik dibagi ke dalam dua kategori : konstelasi politik yang bersifat menguntungkan GUPPI serta konstelasi politik yang bersifat tidak menguntungkan GUPPI dalam upaya memainkan peranan politiknya.

Setelah tahun 1975 GUPPI praktis tidak memainkan peranan politik yang berarti karena beberapa faktor. *Pertama*, pemerintah menunjukkan sikap tidak mentolerir lagi setiap gerakan penentangan yang dilakukan GUPPI. *Kedua*, kekuatan organisasi yang telah merosot tajam yang dikarenakan kualitas kepemimpinan yang cenderung kompromis kepada pemerintah serta tingkat keterpaduan organisasi yang lemah. *Ketiga*, periode 1975 sampai dengan 1980 diwarnai dengan perubahan konstelasi politik nasional yang tidak lagi menguntungkan GUPPI sebagaimana periode sebelumnya. Sejak tahun 1978 konstelasi politik nasional tidaklah menguntungkan GUPPI, dalam hal ini menyangkut tergesernya kedudukan kelompok Ali Murtopo.

Seperti kecenderungan umum yang ada di negara-

negara dunia ketiga, kelompok kepentingan kurang bisa memainkan peranannya walaupun ada praktis sebagai alat yang mendukung penguasa. GUPPI masa 1975-1980 praktis berkembang ke arah itu. GUPPI tidak lagi memainkan peranan sebagai layaknya suatu kelompok kepentingan, tapi GUPPI praktis dikembalikan ke fungsi asal pembentukannya. Awal pembentukan GUPPI sesungguhnya diarahkan untuk kepentingan pemilihan umum, serta sebagai lembaga yang bisa mendukung terciptanya hubungan yang lebih baik antara kalangan Islam dengan pemerintah.

Lahirnya MDI menunjukkan bahwa pengaruh kelompok Ali Murtopo di Golkar mulai terancam, karena MDI secara politis berfungsi untuk menyaingi GUPPI yang selama ini berada dibawah pengaruh Ali Murtopo. Hampir secara bersamaan, dengan tersingkirnya kelompok Ali Murtopo dari Departemen Agama semenjak tahun 1978, memberikan dampak yang tidak kecil bagi GUPPI. Apalagi setelah Alamsyah melakukan manuver-manneuver politik ke dalam GUPPI yang mengakibatkan terciptanya suasana kisruh di dalam organisasi. Lahirnya MDI semakin mendesak GUPPI untuk membidangi bidang pendidikan Islam semata, sementara manuver-manneuver Alamsyah semakin memperlemah organisasi.

Didalam Islam, politik menjadi salah satu fokus pemikiran sosial umat, didasari adanya keyakinan teologis bahwa Islam merupakan agama universal yang

memberikan kehidupan dalam lingkup yang amat luas. Maka didalam Islam tidak ada pemikiran dikhotomik antara Islam dan Politik. Karena Islam adalah agama multidimensional yang mencakup aspek kehidupan religius spiritual dan aspek sosial kemasyarakatan.

Didalam Islam hanya politik kualitas tinggi yang dapat berjalan paralel dan harmonis dengan tujuan besar dakwah. Politik kualitas tinggi itulah yang dikehendaki oleh Islam. Bila dihadapkan dengan kenyataan merajalelanya politik kualitas rendah ditengah masyarakat, kita lantas menghadapi pelbagai masalah dilematis. Memainkan politik kualitas tinggi di tengah samudra politik kualitas rendah memang tidak gampang. Lebih sulit lagi merelevansikan politik dengan tujuan dakwah, agar hubungan fungsional, bahkan hubungan organis diantara keduanya dapat berjalan dengan mulus. Namun perlu diingat, bahwa disinilah justru sebenarnya terletak tantangan bagi kita bersama.

Dengan demikian, motivasi fungsionaris Golkar di dalam berdakwah tentunya tidak hanya karena kekuasaan institusional maupun individual semata yang diperjuangkan agar memperoleh derajat yang diinginkan akan tetapi tujuan sucilah yang harus diperjuangkan dalam kekuasaannya, karena mumpung punya kekuasaan maka bisa diharapkan dapat mewarnai dalam setiap pengambilan keputusan.

B. SARAN

Berdasarkan pengalaman selama melakukan penelitian pustaka dan lapangan, maka penulis berpendapat bahwa :

1. Masih terdapat asumsi di kalangan birokrat bahwa politik adalah "wilayah angker" yang tidak sembarang orang dapat memasukinya, sekalipun untuk tujuan ilmiah. Maka penulis menyarankan agar politik sebagai *political scient* perlu di buka lebar-lebar tanpa harus dilihat dengan kacamata politis.
2. Pemahaman Islam secara parsial akan menyempitkan Islam hanya pada wilayah ritualistis. Politik sebagai salah satu aspek kehidupan ini akan menjadi "barang tercerai" dalam pemahaman pemikiran Islam. Maka harus diupayakan upaya rekonstruksi pemikiran Islam sebagai suatu ajaran yang bersifat universal (*rahmatan lil'alamiin*).
3. Sebagai lembaga yang kerap melakukan aktivitas dakwah, orsospol hendaknya dakwah *bil hal* yang bersifat stimulan saja. Akan lebih baik jika rangsangan itu akan memacu kreatifitas dan tidak menjadi sesuatu kelatahan obyek untuk menerima bantuan secara konstan
4. Transformasi sosial yang cepat saat ini harus diimbangi dengan dakwah yang transformatif pula. Bila dakwah masih tetap menggunakan cara-cara yang

masih tradisional, tanpa ada kemasan yang relevan dengan kondisi saat ini, akibatnya tidak hanya membuat agama terkesan kaku tetapi juga memposisikan Islam sebagai agama yang reaktif.

5. Disaat kedewasaan umat Islam dalam berpolitik makin meningkat dengan kesadaran yang semakin tinggi, orsospol hendaknya perlu mengimbangi dengan tehnik dan metode yang relevan dengan tingkat kedewasaan itu. Disamping itu prinsip kejujuran, keadilan dan kebenaran harus senantiasa di tegakkan.
6. Motivasi dakwah seharusnya menjadi prioritas utama dalam mengamalkan niat *lillahi ta'ala* diseluruh lembaga orsospol yang ada di bawah lingkup Golkar. Karena bekerja tanpa ada suatu motivasi, sama halnya hidup tanpa tujuan.

C. PENUTUP

Alhamdulillah, akhirnya laporan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Meskipun dalam penulisan laporan penelitian ini banyak menghadapi kendala, namun dengan penuh kesabaran dan ketekunan semua kendala itu akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan penelitian ini secara ilmiah masih perlu dilakukan perbaikan disana-sini, karena didalamnya jelas masih terdapat beberapa kekurangan yang luput dari pengamatan penulis. Oleh karena itu penulis berharap dengan

adanya kekurangan tersebut, dapat dijadikan bahan kritikan yang bersifat konstruktif untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Akhirnya penulis serahkan segalanya pada-Nya untuk memberi penilaian akhir. Barangkali ini dapat jadi *lentera* saat hati dalam keadaan gelap.

Billahittaufiq Walhidayah,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Khadim Al-Haromain Asy Syarifain, Al-Qur'an dan Terjemahan, Madinah Munawaroh : 1971
- Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Persoalan Keislaman, Bandung: Mizan, 1993
- A. Syafii Maarif Dr. Islam dan Politik di Indonesia, Yogyakarta : PT. Pustaka Parama Abiwara, 1988
- _____. Islam dan Masalah Kenegaraan. Jakarta : LP3ES, 1985
- Abdul AzisThaba, Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru (1966-1994). Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- Asmuni Syukir, Dasar-Dasar strategi Dakwah Islam. Surabaya : Al-Ikhlâs, 1983
- Aswab Mahasin dan Ismed Natsir, Cendekiawan dan Politik. Jakarta : LP3ES, 1983
- Asghar Ali Engeeneer, Islam dan Pembebasan. Yogyakarta : LKiS 1993
- Bambang Sunggono SH. MS. Partai Politik. Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1992
- Deliar Noer, Gerakan Modern Islam 1900-1942. Jakarta : LP3ES, 1980
- DPP Golkar. 30 Tahun Golkar. Jakarta : PT Metro Pos, 1994
- Fachri Ali dan Bahtiar Efendi, Merambah Jalan Baru Islam. Mizan : 1986
- Herbert Feith dan Lance Castles, Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965. Jakarta: LP3ES, 1988
- Heru Cahyono, Peranan Ulama' Dalam Golkar. Jakarta: Pustaka Sinar, 1992
- Harold Crouch, Militer dan Politik di Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan, 1986
- Jalalludin Rahmad, Islam Aktual. Bandung: Mizan, 1991
- Kuntowijoyo Dr. Paradigma Islam. Bandung: Mizan, 1991
- KGPH.H. Mangkubumi SH. Kerangka Dan Konsepsi Politik Indonesia. Yogyakarta: PT. Mitra Gama Widya, 1989
- M. Amin Rais Dr. Cakrawala Islam. Bandung: Mizan, 1987

- _____. Demokrasi Dan Proses Politik. Jakarta: LP3ES. 1986
- _____. Golkar Dan Demokratisasi di Indonesia. Aditya Media. 1993
- Meriam Budiharjo Prof. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Pt. Gramedia. 1977
- Mochtar mas'ud Dr. Politik Birokrasi dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1994
- Mochtar Mas'ud Dr. dan Colin MacAndrews Dr. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1978
- Sarlito Wirawan Sarwono Dr. Pengantar Umum Psikologi. Jakarta: Bulan Bintang. 1991
- Leo Suryadinata. Golkar dan Militer. Jakarta: LP3ES. 1992
- Lyman Tower Sargent. Ideologi Politik Kontemporer. Jakarta: PT. Bina Aksara. 1986
- Lexy J. Moleong Dr. MA. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya. 1984
- M. Rusli Karim. Nuansa Politik Era 1980-an di Indonesia. Yogyakarta: Media Widya Mandala. 1992
- _____. Perjalanan Partai Politik di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. 1983
- Nasruddin Harahap Cs. Dakwah Pembangunan. Yogyakarta: DPD Golkar Tingkat I. 1992
- Ridwan Saidi. Golkar Pasca Pemilu 1992. Jakarta: Grasindo. 1993
- Robert A. Dahl. Dilema Demokrasi Pluralis. Jakarta: CV. Rajawali. 1985
- Ulf Sundhaussen. Politik Militer Indonesia 1945-1967. Jakarta: LP3ES. 1986
- W. Mont Gomery Watt. Pergolakan Pemikiran Politik Islam. Jakarta: PT. Beunebi Cipta. 1987
- WA. Gerungan. "Psikologi Sosial". Bandung : Eresco. 1994
- Yahya Muhaimin Dr. Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1971

Majalah dan Koran

Prisma, Pebruari 1977

Prisma. No.5 Juni 1988

Prisma, Desember 1980

Prisma, Pebruari 1981

Prisma, September 1981

Prisma, Desember 1981

Tempo, Mei 1987

Tempo, Pebruari 1982

Tempo, April 1982

Tempo, Juni 1982

Tempo, Juni 1992

Kedaulatan Rakyat, 20 Mei 1993



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA